

## Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah akibat Covid-19

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui ada penambahan masyarakat miskin karena waktu-waktu tinggal sebentar lagi," katanya.

Kemudian sisanya akan diselesaikan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sekitar 35-45 persen. Sisanya dari itu, ujar dia, akan kembali diselesaikan pada tahun 2024.

"Jadi diharapkan kalau tidak ada hambatan, yang miskin ekstrem 2024 bisa selesai. Roadmap-nya sudah ada dan disiapkan, tapi tentu tergantung situasi dan keadaan di medan," kata Ma'ruf.

Pasalnya, sering kali prediksi-prediksi yang dibuat tidak semuanya dapat dilalui dengan mulus. Meskipun demikian, dari berbagai rencana yang sudah dipersiapkan pihaknya optimistis kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat ditekan hingga nol persen.

Adapun pada tahun 2021, pemerintah menargetkan penyelesaian kemiskinan ekstrem di 7 provinsi dengan 35 kabupaten/kota. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

"Ini yang paling sulit untuk tercapai pada 2021 karena kondisinya sangat berat, tapi kami sudah berusaha," ucapnya. ● han

keluarga miskin. Ini memang paling berat karena waktunya tinggal sebentar lagi," katanya.

Kemudian sisanya akan diselesaikan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sekitar 35-45 persen. Sisanya dari itu, ujar dia, akan kembali diselesaikan pada tahun 2024.

"Jadi diharapkan kalau tidak ada hambatan, yang miskin ekstrem 2024 bisa selesai. Roadmap-nya sudah ada dan disiapkan, tapi tentu tergantung situasi dan keadaan di medan," kata Ma'ruf.

Pasalnya, sering kali prediksi-prediksi yang dibuat tidak semuanya dapat dilalui dengan mulus. Meskipun demikian, dari berbagai rencana yang sudah dipersiapkan pihaknya optimistis kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat ditekan hingga nol persen.

Adapun pada tahun 2021, pemerintah menargetkan penyelesaian kemiskinan ekstrem di 7 provinsi dengan 35 kabupaten/kota. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

"Ini yang paling sulit untuk tercapai pada 2021 karena kondisinya sangat berat, tapi kami sudah berusaha," ucapnya. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## SIDANG PERSELISIHAN HASIL PILGUB KALIMANTAN SELATAN

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (kedua kiri) didampingi hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foeckh (kanan) meninggalkan ruangan usai memimpin jalannya sidang perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/9/2021). Sidang yang diajukan oleh pemohon perseorangan yakni Khairil Anwar itu beragenda pemeriksaan pendahuluan.

# Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Hujan Interupsi

Beberapa anggota Komisi I DPR mempersoalkan ketidakhadiran Menhan dan Panglima TNI saat rapat yang membahas masalah anggaran.

JAKARTA (IM) - Rapat Komisi I DPR membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (23/9), diwarnai oleh interupsi anggota komisi.

Beberapa anggota Komisi I DPR mempersoalkan ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, yang mengagendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran (RKA) Kemenhan/TNI Tahun Anggaran 2022.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Tb Hasanuddin berpidang, panglima TNI tidak dapat diwakili oleh anak buahnya untuk menghadiri rapat mengenai anggaran.

"Surat panglima TNI

ini perlu dikoreksi, untuk urusan-urusan anggaran, saya ulangi lagi, anggaran, dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah, panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja," kata Hasanuddin.

Dalam rapat tersebut, Menhan Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sedangkan Panglima TNI diwakili oleh Kepala Bais Letjen Joni Supriyanto dengan asisten perencana dari tiap matra.

Menurut Hasanuddin, kepala Bais TNI tidak bisa mengambil peran panglima TNI dalam menentukan anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing matra di TNI. Anggota Komisi I DPR dari

Fraksi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan, ketidakhadiran tersebut merupakan yang pertama kali terjadi.

Padahal, menurut dia, topik pembahasan pada rapat kali ini sangatlah penting sehingga kehadiran menteri pertahanan dan panglima TNI tidak bisa diabaikan.

"Ini preseden pertama terjadi di selama di Komisi I, hampir disetujui semuanya diwakili sementara yang dibahas di Komisi I sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara," katanya seraya meminta mengusulkan agar rapat ditunda.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta menyroti ketidakhadiran kepala staf yang diwakili oleh asisten perencana tiap matra. Menurut Sukamta, rapat hari ini semestinya dihadiri langsung oleh para kepala staf tiap matra karena pembicaraan teknis dengan asisten perencana tiap ang-

katan telah dilakukan.

"Selama ini kalau membahas rapat anggaran ketok hari terakhir begini itu selalu datang itu kepala staf, baru kali ini undangannya kepada asrena. Sementara asrena, asrenum, dan seterusnya itu sudah rapat dengan kita pekan lalu," ujar Sukamta.

Untuk diketahui, Menhan Prabowo tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Sementara, Hadi diketahui telah berkunjung ke Pekanbaru, Riau, untuk melihat kegiatan vaksinasi Covid-19 bersama Kepala BNPB Ganip Warsito dan Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto.

Setelah hujan interupsi dari para anggota Komisi I DPR, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis pun memutuskan untuk menskors rapat. ● han

## Jokowi Diperkirakan Kirim Surpres Calon Panglima TNI Usai PON XX

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin memprediksi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengirimkan surat presiden mengenai calon panglima TNI sesuai penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.

Perlu diketahui bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk sebagai penanggung jawab pengamanan PON XX di Papua yang berlangsung pada 2-15 Oktober 2021.

"Menurut prediksi saya, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi penanggung jawab pengamanan PON XX di Papua, maka diperkirakan Surat Presiden bisa jadi setelah pelaksanaan PON," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9).

Menurut Hasanuddin, tidak ada masalah apabila surpres calon panglima TNI baru ke luar setelah pelaksanaan PON XX. Ia menjelaskan,

## Mantan Mensos Juliari Dieksekusi ke Lapas Kelas I Tangerang

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.

Terpidana kasus suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 tersebut dieksekusi ke Lapas Tangerang setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

"Jaksa eksekusi KPK Suryo Sularso, telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 atas nama terpidana Juliari P Batubara yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (23/9).

Diketahui sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Juliari juga diganjar untuk membayar denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

DPR RI masih dapat melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sesuai masa reses yang dimulai pada 8 Oktober 2021 dan berakhir 7 November 2021.

Hadi baru resmi pensiun pada 1 Desember 2021 sehingga serah jabatan panglima TNI dapat dilakukan pada pekan kedua atau ketiga November 2021. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Baca juga: DPR Belum Terima Surpres soal Calon Panglima TNI, Dasco: Kita Tunggu Saja

"Dari tanggal 8-29 November 2021 adalah waktu untuk melakukan uji kelayakan. Jadi masih memenuhi syarat," ujar politikus PDI-P tersebut.

Diketahui, DPR hingga kini belum menerima surpres mengenai calon panglima TNI. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebutkan, Presiden Jokowi masih mencari sosok terbaik untuk menggantikan Hadi. ● me



FOTO: ANT

## PEMERIKSAAN LANJUTAN YOORY PINONTOAN

Mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/9/2021). Yoory Pinontoan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK dalam perkara korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ronggon, Jakarta.

## Kejaksaa Depok Tangkap Buronan 3,5 Tahun Terpidana Kasus Korupsi

DEPOK (IM) - Terpidana kasus korupsi yang sudah buron, Ade Ohoiwutun, ditangkap tim tangkap buronan Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, di Sukamaju, Cilodong, Depok, pada Rabu (22/9).

Ade disebut merupakan terpidana korupsi anggaran pengadaan makan dan minum DPRD Kota Tual, Maluku, pada 2010 silam. Ade memanfaatkan jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual.

Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, berujar bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi ini sebesar Rp 3.145.781.708,57.

"Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 834 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Februari 2018, terpidana Ade Ohoiwutun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Leonard dalam keterangan resmi yang diterima wartawan

pada Kamis (22/9).

"Dan oleh karenanya terpidana dijatuhi pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan enam bulan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 787 juta," katanya.

Jika uang pengganti tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan, lanjut Leonard, maka harta benda Ade disita oleh jaksa dan dilelang. Lalu, apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Ade dipidana penjara selama tiga tahun.

Leonard menambahkan, Ade ditangkap karena tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut oleh jaksa eksekutor Kejari Tual.

Selanjutnya, Ade ditiptkan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan dan rencananya akan diberangkatkan ke Tual pada hari ini menggunakan pesawat terbang untuk melaksanakan eksekusi hukuman. ● me

## Lulusan S2 Inggris Pilih Masuk TNI AD Demi Mengabdikan pada Negara

JAKARTA (IM) - Letda Ckm Jason Antoni Wibowo, lulus S2 dari Inggris, lebih memilih menjadi bagian dari TNI AD. Alasannya, ia ingin mengabdikan kepada negara menjadi dokter militer.

Jason menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Internasional. Tak tanggung-tanggung, ia mengambil program kembar atau double degree diambalnya.

Selapas lulus S-1, pria kelahiran 13 November 1993, langsung mengambil S-2 bergelar Master of Research Newcastle, Inggris dengan konsentrasi Stem Cell pada berbagai bidang prinsip ilmu spesialisasi kedokteran.

Ayah Jason bernama Sugiharto, merupakan keturunan Jawa, sedangkan sang ibu, Elisa Sinaga dari keturunan Jakarta-Tionghoa.

"Saya menjalani program S-2 dari program S-1 FKUI Internasional, jadi disitu double degree, selain saya dapat gelar dokter umum dari S-1 Internasional FKUI saya juga menamatkan S-2 Master of Research dari Newcastle University Inggris. Di sana mengambil major stem cell," ungkap Jason dalam tayangan video TNI AD dikutip pada Kamis (23/9)

Karier kedokterannya dimulai ketika dia mendapatkan kesempatan magang bersama Kementerian Kesehatan (Kemkes). RSUD SK Lerik Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tempat pertama pengabdianya kepada masyarakat sebagai dokter.

Kisahnyapincut dengan TNI AD bermula saat dirinya

menggelar bakti sosial di Wini, NTT bersama Yonif 715/Motuliato yang mengamankan daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Di sana, digelar operasi mata katarak gratis.

"Dari situ saya melihat bahwa TNI AD ini memiliki korps kesehatan yang besar, mereka dapat menaungi dokter-dokter dan nakes untuk bisa berkembang, di situ saya tertarik mengapa tidak saya dokter sipil juga bergabung ke TNI AD," tuturnya.

Menurut dia, dengan menjadi bagian dari TNI bisa membuatnya memperoleh pengabdianya kepada masyarakat. Selain itu, daerah-daerah yang terpencil dan tak terjangkau bisa diraihnya.

Sebelum memutuskan itu, Jason menyebut bahwa dia sempat berkonsultasi dengan beberapa dokter militer yang sebelumnya telah ditemuinya ketika menggelar operasi katarak gratis. Baik suka maupun duka disampaikan oleh para dokter menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Jason.

Jason sadar, yang disampaikan oleh para dokter memang bukan hal yang manis-manis saja, melainkan ada pula kesulitannya. Tapi Jason tak ambil pusing, bagi dia, hal itu cukup dijadikan pelecuk semangatnya, karena kalau sudah berkomitmen apapun dapat dilalui. "Saya banyak berkonsultasi dengan dokter waktu saya bakso di Wini NTT sana. Lalu kami bertukar pengalaman, dari sana saya mulai tertarik. Ya memang diceritakan ada suka maupun dukanya tapi saya anggap itu semua bagian perjalanan dari

karier saya. Kalau kita sudah bertekad, berkomitmen apapun yang kita hadapi pasti bisa kan kita lewat," katanya.

Akhirnya, Jason membulatkan tekad untuk mendaftarkan diri menjadi Perwira Prajurit Karier TNI AD. Setelah betagam macam proses dilaluinya, Jason berangkat ke Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

Selama tujuh bulan lamanya dia digembleng dengan hal berbau kemiliteran. Selepas mengenyam pendidikan di sana, Jason belajar tentang kecakapan kesehatan di Pusdikkes selama lima bulan.

Di sana Jason dikenalkan dan belajar banyak hal, mulai dari batalyon kesehatan, peran-peran dokter militer, hingga peran Komandan Ple-ton kesehatan. Semuanya dia pelajari dari mulai tingkat Batalyon hingga rumah sakit jajaran TNI AD.

"Kami juga belajar juga tentang struktur organisasi, dan lain lain, banyak hal yang dipelajari khususnya di bidang kesehatan militer," ucapnya.

Seluruh proses yang dilaluinya itu cuma bermuara pada satu harapan, yakni pengabdian kepada negara yang disebutnya sebagai Indonesia tercinta. Menurut dia, pengabdian itu mampu tercapai melalui TNI AD.

"Harapan saya tentunya bisa untuk mengabdikan kepada negara indonesia tercinta, bisa mengabdikan kepada masyarakat untuk pengabdian profesi dokter saya. Dan saya bisa menjangkau masyarakat di Indonesia, dengan TNI saya yakin itu semua bisa," tandasnya. ● me

PENGUMUMAN	ANNOUNCEMENT
Direksi PT Trinusa Travelindo, berdomisili di Kabupaten Tangerang ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan hal-hal berikut ini:	The Board of Directors of PT Trinusa Travelindo, domiciled in Kabupaten Tangerang (the "Company") hereby announces the following:
1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, dengan ini disampaikan kepada publik bahwa Direksi Perseroan berencana melakukan konversi hutang menjadi saham oleh (i) pemegang saham pada; dan (ii) Traveloka Services Pte. Ltd., anggota grup perusahaan dari, Perseroan;	1. To comply with Article 6 of Government Regulation No. 15 of 1999 on the Certain Forms of Receivables that can be Compensated as Shares Injection, the Board of Directors of the Company announces its plan to convert the payable to become capital by (i) the existing shareholder of; and (ii) Traveloka Services Pte. Ltd., a member of the group company of the Company;
2. Sebagai akibat konversi tersebut, terjadi perubahan pengendalian pada Perseroan oleh Traveloka Services Pte. Ltd. Oleh karena itu, pemberitahuan ini sekaligus dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) sehubungan dengan transaksi Pengambilalihan.	2. As the result of the conversion, there is a change of control in the Company by Traveloka Services Pte. Ltd. Therefore, this announcement shall also serve to comply with Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company (as amended) in relation to the Acquisition.
Sehubungan dengan Pengambilalihan tersebut, setiap kreditor mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap Pengambilalihan dalam waktu 14 hari kalender setelah pengumuman ini dengan mengirimkan pemberitahuan keberatan secara tertulis kepada Perseroan ke alamat sebagai berikut, disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan dasar dari keberatan tersebut:	In relation to the Acquisition, any creditors shall have the rights to file for objection on the Acquisition within 14 calendar days after this announcement by delivering a written notice on the objection to the Company to the following address, accompanied by the underlying reasons and basis for the objection:
Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1) South Tower Lantai 2 Zone 10 JI. Grand Boulevard BSD Green Office Park, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1) South Tower Lantai 2 Zone 10 JI. Grand Boulevard BSD Green Office Park, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten
Apabila tidak terdapat keberatan yang diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 14 hari kalender, rencana Pengambilalihan akan dianggap telah disetujui.	If no objection is received by the Company within 14 calendar days, the Acquisition plan will be deemed approved.
Demikianlah pengumuman ini dibuat.	Thus we convey the above
Tangerang, 24 September 2021	Tangerang, September 24, 2021
Td, Direksi PT Trinusa Travelindo	Regards, The Board of Directors PT Trinusa Travelindo

PENGUMUMAN
PT. ASSET PACIFIC, berkedudukan di Jakarta Pusat, ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan akta tertanggal 20 September 2021, Nomor 59, yang dibuat dihadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan Konversi atas hutang Perseroan kepada tunj SURYA DARMADI, sebesar Rp. 300.000.000.000,- menjadi setoran saham dalam Perseroan.
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1999.
Jakarta, 24 September 2021
Direksi PT ASSET PACIFIC

PENGUMUMAN
Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT The Database Dept Indonesia tertanggal 23 September 2021 Nomor 43, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburuan, SH., Notaris di Jakarta Selatan, telah diputuskan untuk membubarkan PT THE DATABASE DEPT INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dan untuk pembebasan hal-hak dan kewajiban-kewajiban telah ditunjuk Bapak Raymondus Partoto HS, SH., MM., selaku Likuidator.
Sehubungan dengan pembubaran Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Kreditor yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan harap segera membereskan tagihan kepada Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini di Versailles Residence F 6 No. 26, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Up. Bpk. Raymondus Partoto HS, SH., MM).
Jakarta, 24 September 2021
Direksi